

MENIMBANG KEMBALI KONSEP DEMOKRASI

Adian Husaini

Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations/INSISTS

ABSTRACT

This article challenges democracy, saying that it originated from the West. It cites ideas propagated by several orthodox Muslim thinkers who are mainly disagree with democracy. First, that democracy is basically Western bestseller-product offered to the Muslim world. Second, that it is a secular and worldly system that contradicts with the basic mores of Islam stated in Quran and Sunnah. This article urges that the perfect-system shall be the celebration of the bliss of Heaven. Third, that the absolute authority is in the hand of people. It believes on the supremacy of God's authority rather than people's. It recommends furthermore that Muslim shall question democracy and establish a more Islamic model, without offering a systematic research-based Islamic thought being implemented in the Muslim world.

Keywords: *Islam, democracy, the West, Quran, Sunnah.*

Euphoria

'Demokrasi' masih tetap menarik dan perlu untuk diper-bincangkan, meskipun manusia sebenarnya tidak pernah sepakat akan maknanya. Saat bertugas sebagai wartawan Harian *Berita Buana*, tahun 1990, saya pernah ditugasi meliput satu seminar tentang demokrasi di salah satu hotel di Jakarta. Tema seminarnya tentang demokrasi dan agama-agama. Saat itu, banyak diskusi tentang demokrasi digelar. Seperti paham-paham lainnya, karena dianggap sebagai paham yang bersifat universal dan harus dipeluk oleh seluruh umat manusia, maka agama-agama juga

diminta menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman. Para tokoh dari berbagai agama yang hadir dalam seminar itu kemudian didorong untuk memberikan legitimasi, bahwa paham demokrasi adalah sesuai dengan ajaran agama masing-masing.

Salah satu buku yang banyak diperbincangkan pada dekade 1990-an adalah *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*, karya Samuel P. Huntington. Di buku ini, Huntington menyimpulkan: "Singkat kata, demokrasi hanya cocok bagi negara-negara Eropa Barat laut dan barangkali negeri-negeri Eropa Tengah serta koloni-konoli penduduk

yang berasal dari negara-negara itu.” Tentang Islam, Huntington menyebutkan, bahwa “doktrin Islam mengandung unsur-unsur yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan demokrasi.” Bahkan, Huntington juga menegaskan: “Budaya Islam dan Konfusius menghadapkan perkembangan demokrasi dengan penghalang yang tidak mudah teratasi.”¹

Seolah-olah seperti terprovokasi oleh Huntington, banyak kalangan cendekiawan yang kemudian tersengat, lalu berteriak lantang bahwa “Islam sesuai dengan demokrasi!” Hanya ada seorang cendekiawan dalam seminar itu yang memberikan kritik terhadap konsep demokrasi. Karena sudah menjadi tren global, maka banyak orang yang kemudian ikut-ikutan lantang menyuarakan lagu wajib “demo-krasi”. Bahwa, seolah-olah, demokrasi adalah berkah yang harus dipeluk oleh setiap manusia. Hanya dengan demokrasilah, suatu bangsa akan menjadi bangsa besar. Bahkan, ada yang menjadikan demokrasi bukan sekedar mekanisme pemilihan kepe-mimpinan, tetapi sebagai tujuan dan jalan hidup itu sendiri. Pokoknya, harus demokrasi! Makmur atau sengsara, tidak penting!

Jean-Francois Revel, dalam bukunya, *Democracy Against Itself*, menyebut dekade 1980-an sebagai era “*democratic euphoria*”. Gorbachev,

dalam pidatonya di PBB, 7 Desember 1988, memproklamasikan: “*The whole world is becoming democratic.*” Lembaga terkemuka yang menjadi rujukan dalam penilaian demokrasi adalah Freedom House, yang menerbitkan laporan pertamanya tentang demokrasi tahun 1974. Tiap tahun, lembaga yang bermarkas di New York ini membuat daftar negara-negara yang masuk kategori demokratis. Tahun 1989, melalui majalahnya, *Freedom at Issue*, Freedom House menyebut, dekade 1990-an, sebagai “*the decade of global democracy*”, yang menegaskan: “*Democracy had won, it was endlessly repeated, and the threats to it either were gone or were on the way out.*”²

Gelombang besar isu demokrasi ini pun kemudian turut menyeret kalangan Muslim untuk masuk ke pusaran gelombang isu demokrasi. Seolah-olah agar jangan dikatakan ketinggalan jaman, dan masuk bagian dari pergaulan global, maka tidak sedikit yang kemudian ikut-ikutan berteriak “demokrasi”. Dan memang, menurut kata-kata terkenal dari Ibn Khaldun, ada kecenderungan manusia untuk mengikuti tradisi pihak yang menang. (*al-maghlub mu’laun abadan bil-iqtida’ bil-ghaalib*). Karena peradaban Barat adalah peradaban yang sedang menang, maka tidak sedikit yang kemudian menjadikan sebagai kiblat dalam pemikirannya.

¹Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga* (Jakarta: Pustaka Grafiti, 1997), hal. 396-398.

²Jean-Francois Revel, *Democracy Against Itself*, (New York: The Free Press, 1993), hal. 6-10.

Menyusul Pemilu 2004, Indonesia kemudian bisa “membanggakan” diri di depan negara-negara Barat: “Kami negara demokrasi terbesar ketiga.” Tahun 2005, Freedom House pun menerbitkan laporan yang mengelompokkan Indonesia sebagai negara demokrasi yang memiliki kebebasan penuh. Petinggi-petinggi AS pun kemudian secara bergantian memuji-muji Indonesia. Dan tentu, banyak yang senang dipuji oleh petinggi negara adi kuasa seperti AS.

Saat berkunjung ke Indonesia, pada 18 Februari 2009, Menlu AS, Hillary Clinton menyatakan: “Indonesia telah mengalami transformasi yang besar dalam sepuluh tahun terakhir. Beberapa hal yang saya catat adalah penghormatan atas HAM, demokratisasi, sukses mengakhiri konflik sektarian dan menjadi tempat yang aman,” kata Hillary. Tentu, banyak yang kemudian bangga, karena dipuji oleh Nyonya Clinton.

Prof. Azyumardi Azra, dalam satu kolomnya di Harian *Republika*, (8/4/2004), mendukung penuh kesimpulan Freedom House (2002) bahwa “*democratic ferment*”, bibit-bibit dan semangat demokrasi, sangat hidup di Indonesia. Prof. Azra menulis: “Jika di banyak negara Muslim lainnya, khususnya di Timur Tengah, terdapat defisit demokrasi yang mencolok, sebaliknya kaum Muslimin yang merupakan penduduk mayoritas di Indonesia telah membuktikan sekali lagi bahwa demokrasi punya harapan untuk tumbuh dan berurat-berakar di negeri ini.”

Salah satu dampak globalisasi adalah terbentuknya masyarakat yang “*powerless*”. Ide-ide dan budaya lokal tersapu oleh arus besar globalisasi, yang menyapu dunia tanpa kenal ampun. Isu demokrasi pun, kemudian menyebabkan munculnya ketidakberdayaan. Dunia dipaksa hanya meyakini satu kebaikan: “demokrasi”. Bahkan, pada sejumlah orang, demokrasi kemudian telah dikeramatkan dan disucikan; dijadikan sebagai jimat. Hanya dengan demokrasi Indonesia akan menjadi bangsa besar.

Dan memang, salah satu ciri manusia Indonesia, menurut budayawan Mochtar Lubis, adalah senang dengan takhayul dan mantra-mantra. Kata Mochtar, dalam bukunya, *Manusia Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001): “Ciri keempat utama manusia Indonesia adalah manusia Indonesia masih percaya takhayul. Dulu, dan sekarang juga, masih ada yang demikian, manusia Indonesia percaya bahwa batu, gunung, pantai, sungai, danau, karang, pohon, patung, bangunan, keris, pisau, pedang, itu punya kekuatan gaib, keramat, dan manusia harus mengatur hubungan khusus dengan ini semua. Kemudian, kita membuat mantera dan semboyan baru, jimat-jimat baru, Tritura, Ampera, orde baru, the rule of law, pemberantasan korupsi, kemakmuran yang merata dan adil, insan pembangunan. Manusia Indonesia sangat mudah cenderung percaya pada menara dan semboyan dan lambang yang dibuatnya sendiri.”³

³Mochtar Lubis, *Manusia Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hal. 29.

Ketika demokrasi telah menjadi barang keramat, maka diskusi tentang demokrasi tak banyak manfaatnya. Sebab, itu telah dijadikan sebagai bagian dari aqidah; dilafalkan dan dijadikan wirid tanpa dipahami makna yang sebenarnya. Yang menolak dan mengkritik demokrasi akan dicap sebagai bagian dari “poros setan”. Padahal, negara-negara yang menggembar-gemborkan demokrasi pun—seperti AS—juga tidak mau menerapkan demokrasi sepenuhnya. Demokrasi hanya digunakan dan diterapkan jika sesuai dengan kepentingan mereka.

Lihat saja, ketika Hamas menang Pemilu Palestina, maka AS pun menolak demokrasi, sebab hasilnya tidak sesuai dengan kemauan AS dan Israel. Hingga kini, AS tetap membangun aliansi dengan negara-negara yang tidak demokratis. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah contoh nyata pelanggaran demokrasi. Barat (AS dan sekutu-sekutunya) tidak percaya, bahwa umat manusia yang mayoritas dapat menghasilkan keputusan yang baik buat dunia internasional, jika bertentangan dengan kemauan mereka. Karena itu, sejak awal berdirinya PBB, 24 Oktober 1945, Barat memaksakan sistem “aristokratik”, dimana kekuasaan PBB diberikan kepada beberapa buah negara yang dikenal sebagai “The Big Five” (AS, Rusia, Perancis, Inggris, Cina). Kelima negara inilah yang mendapatkan hak istimewa berupa hak ‘Veto’. Lima negara ini merupakan anggota tetap dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB. Sisanya, 10 negara, dipilih setiap dua

tahun oleh Majelis Umum PBB. Pasal 24 Piagam PBB menyebutkan, bahwa Dewan ini mempunyai tugas yang sangat vital yaitu “bertanggung jawab untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional”. Jika satu resolusi diveto oleh salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB, maka resolusi itu tidak dapat diterapkan. Dalam pasal 29 Piagam PBB dikatakan: “*Decision of the Security Council on all other matters shall be made by an affirmative vote of nine members including the concurring votes of the permanent members.*”

Falsafah PBB yang meletakkan sistem yang aristokratik ini menunjukkan, bahwa Demokrasi Liberal adalah sebuah pilihan yang tidak selalu didukung oleh Barat. Jika percaya pada falsafah demokrasi, bahwa “suara rakyat adalah suara Tuhan” (*vox populi vox dei*), mengapa Barat tidak mau melakukan restrukturisasi PBB, yang sudah berpuluh-puluh tahun dituntut oleh mayoritas negara di dunia? Dunia seringkali disuguhi tontonan ironis di PBB, ketika mayoritas anggota PBB di Majelis Umum menyetujui satu resolusi, tetapi hanya karena satu negara anggota tetap Dewan Keamanan tidak setuju, maka keputusan PBB itu menjadi tidak bergigi. Dewan Keamanan PBB juga tidak pernah berhasil mengeluarkan resolusi yang mengecam tindakan AS. Sebab, dalam falsafah dan sistem PBB, AS tidak dapat dihukum, apapun kejahatannya. Meskipun sudah melakukan kebiadaban yang luar biasa di Palestina, Israel tetap aman-aman saja. Padahal, mayoritas dunia mengutuk serangan Israel ke Gaza.

Akhir sejarah?

Tidak dapat dipungkiri, Peradaban Barat (*Western Civilization*) adalah peradaban yang sedang mendominasi umat manusia saat ini. Ratusan tahun lalu, peradaban yang berpusat di benua Eropa ini bangkit dan menjadi peradaban unggul dalam berbagai bidang. Namun, diakui, disamping membawa banyak kemajuan kepada umat manusia, peradaban ini juga menyimban bara api atau magma yang sangat dahsyat yang setiap saat bisa meledak dan mampu menghancurkan seluruh planet bumi dalam waktu singkat. Dalam sejarahnya, belum pernah ada peradaban yang sedang dan berpotensi besar menghancurkan dunia dan umat manusia seperti yang terjadi di era dominasi peradaban Barat saat ini.

Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas menulis: “*Many challenges have arisen in the midst of man’s confusion throughout the ages, but none perhaps more serious and destructive to man than today’s challenge posed by Western Civilization.*” Kekacauan itu, menurut al-Attas, bersumber dari keilmuan (*knowledge*) Barat itu sendiri. *Knowledge* yang disebarkan Barat pada hakekatnya telah menjadi problematik, karena kehilangan tujuan yang benar; dan lebih menimbulkan kekacauan (*chaos*) dalam kehidupan manusia, ketimbang membawa perdamaian dan keadilan. Menurut al-Attas, bagi Barat, kebenaran fundamental dari agama, dipandang sekedar teoritis. Kebenaran

absolut dinegasikan dan nilai-nilai relatif diterima. Tidak ada satu kepastian. Konsekuensinya, adalah penegasian Tuhan dan Akhirat dan menempatkan manusia sebagai satu-satunya yang berhak mengatur dunia. Manusia akhirnya dituhankan dan Tuhan pun dimanusiakan. (*Man is deified and Deity humanised*).⁴

Pada dekade 1990-an, muncul dua ilmuwan yang sangat populer di dunia internasional: yaitu Samuel P. Huntington dan Francis Fukuyama. Huntington populer dengan bukunya *The Clash of Civilizations and The Remaking of World Order* dan Fukuyama populer dengan bukunya *The End of History and The Last Man*. Segera, setelah penerbitannya, buku Fukuyama mendapatkan banyak pujian.

Sebagaimana Huntington, yang menulis bukunya setelah perdebatan panjang tentang artikelnya “*The Clash of Civilizations?*” di *Jurnal Foreign Affairs* (summer 1993), buku Fukuyama juga merupakan pengembangan dari artikelnya “*The End of History?*” di jurnal *The National Interest* (summer 1989). Dalam makalahnya itu, Fukuyama, mencatat, bahwa setelah Barat menaklukkan rival ideologisnya, monarkhi hereditas, fasisme, dan komunisme, dunia telah mencapai satu konsensus yang luar biasa terhadap demokrasi liberal. Ia berasumsi, bahwa demokrasi liberal adalah semacam titik akhir dari evolusi ideologi atau bentuk final dari bentuk

⁴Jennifer M. Webb (ed.), *Powerful Ideas: Perspectives on the Good Society*, (Victoria, The Cranlana Program, 2002), vol 2, hal. 231-240.

pemerintahan. Dan ini sekaligus sebuah ‘akhir sejarah’ (*the end of history*). (*A remarkable consensus concerning the legitimacy of liberal democracy as a system of government had emerged throughout the world over the past few years, as it conquered rival ideologies like hereditary monarchy, fascism, and most recently communism. More than that, however, I argued that liberal democracy may constitute the “end point of mankind’s ideological evolution” and the “final form of human government,” and as such constituted the “end of history.”*)⁵

Dalam bukunya, Fukuyama memasang sederet negara yang pada tahun 1990-an memilih sistem demokrasi-liberal, sehingga ini seolah-olah menjadi indikasi, bahwa –sesuai ramalan Hegel– maka akhir sejarah umat manusia adalah kesepakatan mereka untuk menerima Demokrasi Liberal. Tahun 1790, hanya tiga negara, AS, Swiss, dan Perancis, yang memilih demokrasi liberal. Tahun 1848, jumlahnya menjadi 5 negara; tahun 1900, 13 negara; tahun 1919, 25 negara, 1940, 13 negara; 1960, 36 negara; 1975, 30 negara; dan 1990, 61 negara.⁶

Pada ‘akhir sejarah’, kata Fukuyama, tidak ada lagi tantangan ideologis yang serius terhadap Demokrasi Liberal. Di masa lalu, manusia menolak Demokrasi Liberal sebab mereka percaya bahwa Demo-

krasi Liberal adalah inferior terhadap berbagai ideologi dan sistem lainnya. Tetapi, sekarang, katanya, sudah menjadi konsensus umat manusia, kecuali dunia Islam, untuk menerapkan Demokrasi Liberal. Ia menulis: “*At the end of history, there are no serious ideological competitors left to Liberal Democracy. In the past, people rejected Liberal Democracy because they believed that it was inferior to monarchy, aristocracy, theocracy, fascism, communist totalitarianism, or whatever ideology they happened to believe in. But now, outside the Islamic world, there appears to be a general consensus that accepts liberal democracy’s claims to be the most rational form of government, that is, the state that realizes most fully either rational desire or rational recognition.*”⁷

Pendapat Fukuyama bahwa pada masa akhir sejarah tidak ada tantangan serius terhadap Demokrasi Liberal dan umat manusia –di luar dunia Islam– telah terjadi konsensus untuk menerapkan Demokrasi Liberal adalah merupakan statemen yang sangat *debatable* dan terbukti kontradiktif dengan sikap Barat sendiri. Dalam memandang ‘demokrasi’, Fukuyama mengadopsi pendapat Huntington, tentang perlunya proses sekularisasi sebagai prasyarat dari demokratisasi. Karena itu, ketika Islam dipandang

⁵Francis Fukuyama, *The End of History and the Last Man*, (New York: Avon Books, 1992), hal. xi

⁶Francis Fukuyama, *The End of History and the Last Man*, hal. 49-50.

⁷Francis Fukuyama, *The End of History and the Last Man*, hal. 211-212.

‘tidak *compatible*’ dengan demokrasi, maka dunia Islam juga tidak kondusif bagi penerapan demokrasi yang bersifat sekular sekaligus liberal.

Dalam kajiannya tentang ‘Gelombang Demokratisasi Ketiga’, Huntington mengungkap penelitian yang menunjukkan adanya hubungan negatif antara Islam dan demokratisasi. Sebaliknya, ada korelasi yang tinggi antara agama Kristen Barat dengan demokrasi. Di tahun 1988, agama Katolik dan/atau Protestan merupakan agama dominan pada 39 dari 46 negara demokratis. Ke-39 negara demokratis itu merupakan 57 persen dari 68 negara dimana Kristen Barat merupakan agama dominan. Sebaliknya, papar Huntington, dari 58 negara yang agama dominannya bukan Kristen Barat, hanya ada 7 negara (12 persen) yang dapat dikategorikan negara demokratis. Jadi, simpul Huntington, demokrasi sangat jarang terdapat di negeri-negeri di mana mayoritas besar penduduknya beragama Islam, Budha, atau Konfusius. Diakui oleh Huntington, korelasi itu bukan merupakan hubungan sebab akibat. “Namun, agama Kristen Barat menekankan martabat individu dan pemisahan antara gereja dan negara (sekuler.pn). Di banyak negeri, pemimpin-pemimpin gereja Protestan dan Katolik telah lama merupakan sosok utama dalam perjuangan menentang negeri-negeri represif. Tampaknya masuk akal menghipotesakan bahwa meluasnya agama Kristen mendorong

perkembangan demokrasi,” papar Huntington.⁸

Tentang hubungan agama dengan sekularisasi, Fukuyama mencatat, bahwa liberalisme tidak akan muncul, jika Kristen tidak melakukan sekularisasi. Dan itu sudah dilakukan oleh Protestanisme di Barat, yang telah membuang adanya kelas khusus pemuka agama dan menjauhkan diri dari intervensi terhadap politik. Tulis Fukuyama: “*Christianity in a certain sense had to establish itself through a secularization of its goals before liberalism could emerge. The generally accepted agent for this secularization in The West was Protestantism. By making a religion a private matter between Christian and his God, Protestantism eliminated the need for a separate class of priests, and religious intervention into politics more generally.*”⁹

Fukuyama menyorot dua kelompok agama yang menurutnya sangat sulit menerima demokrasi, yaitu Yahudi Ortodoks dan Islam fundamentalis. Keduanya dia sebut sebagai “*totalistic religious*” yang ingin mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat publik maupun privat, termasuk wilayah politik. Meskipun agama-agama itu bisa menerima demokrasi, tetapi sangat sulit menerima liberalisme, khususnya tentang kebebasan beragama. Karena itulah, menurut Fukuyama, tidak mengherankan, jika satu-satunya negara Demokrasi Liberal di dunia

⁸Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, hal. 89

⁹Francis Fukuyama, *The End of History and the Last Man*, hal. 216

Islam adalah Turki, yang secara tegas menolak warisan tradisi Islam dan memilih bentuk negara sekular di awal abad ke-20.¹⁰ Bernard Lewis, seorang orientalis Yahudi, juga menulis: “*Without a secular state and a neutral civil society, there can be neither democracy nor development.*”¹¹

Banyak kritik terhadap Fukuyama. Tidaklah benar, saat ini tidak ada tantangan serius secara ideologis terhadap Demokrasi Liberal. Faktanya, pasca Perang Dingin, Islam masih dianggap sebagai tantangan ideologis yang serius, sehingga negara-negara Barat sangat khawatir terhadap munculnya negara yang menerapkan ideologi Islam. Sebab, menurut Huntington, Islam adalah satu-satunya peradaban yang pernah membuat Barat tidak merasa aman. Katanya: “*Islam is the only civilization which has put the survival of the West in doubt, and it has done at least twice.*”¹²

Kasus dukungan Barat terhadap pembatalan Pemilu di Aljazair yang dimenangkan oleh FIS menunjukkan, bahwa Barat menganggap ada tantangan serius terhadap ideologi mereka. Menurut Christopher Ogden (dalam artikel “*View from Washington*”, *Times*, 3 Februari 1992), tindakan AS yang mendukung permainan kekuasaan antidemokrasi merupakan suatu tindakan yang sangat keliru. Sikap AS dan Perancis yang menyatakan bahwa

kudeta Aljazair “konstitusional”, tidak lain merupakan gejala penyakit gila paranoid (ketakutan tanpa dasar) terhadap Muslim Fundamental. Ogden menulis bahwa nonsense menyatakan AS tidak dapat mempengaruhi perubahan di Aljazair. Seperti disebutkan terdahulu, pasca runtuhnya Komunisme, justru Barat menerapkan pandangan yang paranoid dan berlebihan terhadap Islam. Itu bisa disimak dari berbagai perlakuan yang diterima kaum Muslim yang memasuki negara-negara Barat setelah peristiwa 11 September 2001. Hanya karena namanya berbau Islam, atau wajahnya bercorak Arab, maka seseorang yang memasuki negara-negara Barat dapat menerima perlakuan yang tidak manusiawi. Ketakutan yang membabi buta telah menjadi satu sindroma semacam paranoid. Barat sangat khawatir jika ada negara yang menerapkan sistem atau hukum Islam.

Harian *New Straits Times* edisi 15 September 2004, memuat berita berjudul “*Turkish women denounce plans to criminalise adultery*”. Wanita-wanita Turki mengecam rencana untuk mengkriminalkan perbuatan zina. Diceritakan, bahwa parlemen Turki sedang mendiskusikan satu Rancangan Undang-undang yang diajukan pemerintah yang isinya menetapkan perzinahan sebagai satu bentuk

¹⁰Francis Fukuyama, *The End of History and the Last Man*, hal. 216

¹¹Jean-Francois Revel, *Democracy Against Itself*, hal. 213.

¹²Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*, (New York: Touchtone Books, 1996), hal. 209-210.

kejahatan kriminal. Menurut PM Turki, Recep Tayyip Erdogan, Undang-undang itu dimaksudkan untuk melindungi keluarga dan istri-istri dari perselingkuhan/perzinahan suaminya. RUU itu kemudian menimbulkan kontroversi hebat. Yang menarik, bukan kalangan dalam Turki saja yang ribut, tetapi juga pejabat-pejabat Uni Eropa. Pejabat perluasan Uni Eropa, Guenter Verheugen, menyatakan, bahwa sikap anti perzinahan dapat menciptakan imej bahwa Undang-undang di Turki mulai mendekati hukum Islam. Bahkan, Menteri Luar Negeri Inggris, Jack Straw menyatakan, bahwa jika proposal itu disahkan sebagai Undang-undang, maka akan menciptakan kesulitan bagi Turki. (*If this proposal, which I gather is only a proposal in respect of adultery, were to become firmly fixed into law, than that would create difficulties for Turkey*).

Kasus di Turki ini menarik untuk disimak, bagaimana masalah moral yang menjadi urusan internal dalam negeri satu negeri muslim ternyata mendapat perhatian besar dari tokoh-tokoh Barat. Bahkan, dapat berdampak pada masalah politik yang serius. Mengapa orang-orang Barat (Eropa) itu begitu khawatir jika rakyat Turki, melalui parlemen mereka, memutuskan bahwa perzinahan adalah salah satu bentuk kejahatan? Ada apa dibalik semua ini? Apakah karena mereka merupakan pelanggan tetap pelacur-pelacur Turki, sehingga dengan diundangkannya larangan perzinahan, maka mereka akan kehilangan kesempatan untuk melampiaskan syahwat mereka?

Mengapa mereka tidak membiarkan saja, sesuai jargon demokrasi liberal mereka, rakyat Turki untuk menentukan apa yang baik dan buruk untuk mereka? Mengapa langsung saja mereka mengingatkan, bahwa undang-undang itu akan mendekatkan Turki kepada Islam?

Kasus Turki ini sekaligus menjadi bukti bahwa Barat bersikap begitu paranoid terhadap penerapan hukum Islam, dan sekaligus mematahkan tesis Fukuyama tentang tidak adanya tantangan ideologis yang serius terhadap Demokrasi Liberal pasca Perang Dingin. Karena itu, klaim Fukuyama bahwa telah terjadi konsensus umat manusia untuk memeluk 'Demokrasi Liberal' juga berlebihan. Klaim ini sangat terlalu dini dan mendapatkan banyak kritik. Kemajuan dan kemenangan, serta apa yang disebut oleh Fukuyama sebagai 'konsensus' dunia internasional –suka atau terpaksa– untuk mengambil dan menerapkan nilai dan sistem Barat memang sebuah fakta yang tidak dapat diingkari. Dimana telah terjadi konsensus umat manusia? Pada sisi ini, sikap Barat juga paradoks. Pada satu sisi mengkampanyekan 'pluralisme' sebagai salah satu elemen dasar Demokrasi Liberal, tetapi pada sisi lain juga memaksakan 'uniformitas' tentang keharusan menerapkan standar Barat dalam berbagai aspek kehidupan umat manusia, seperti yang terjadi di Turki. Dukungan Barat terhadap rezim otoriter yang anti-demokrasi di dunia Islam –hanya karena menjamin kepentingan Barat–menambah pekatnya kadar paradoksi Barat.

Nicholas Lash, seorang guru besar di *University of Cambridge*, menulis satu bab berjudul *'Beyond The End of History?'* dalam bukunya, *The Beginning and The End of Religion*. Lash menyebut gagasan Fukuyama tentang *'The End of History'* sebagai *'lelucon gila tentang akhir sejarah'* (*the mad joke of the end of history*). Ia mencatat: *Unfortunately, notwithstanding, his wistful recognition that 'The end of history will be a very sad time' with little left for human beings (or, perhaps, white American males?) to do except be caretakers of 'the museum of history', Fukuyama still supposes there to be no thinkable alternative to a historicist understanding of history as a tale of 'progress', an 'evolution from primitive to modern'.*¹³

Paradoks

Disamping menawarkan banyak kemudahan dan nilai-nilai positif terhadap umat manusia, seperti nilai keterbukaan dan pertanggungjawaban (*accountability*) dalam sistem pemerintahan, sistem Demokrasi Liberal Barat pun tidak kurang mendapatkan kritik tajam, sepanjang sejarah peradaban Barat sendiri. Demokrasi Liberal bukan hanya memiliki nilai positif. Tetapi, demokrasi juga menyimpan kelemahan-kelemahan internal yang fundamental. Dalam sistem inilah, ilmu pengetahuan tidak dihargai. Orang pintar disamakan haknya dengan orang bodoh. Seorang profesor ilmu politik memiliki hak

suara yang sama dengan orang pedalaman yang tidak mengerti baca-tulis dan informasi politik. Seorang yang taat beragama disamakan hak suaranya dengan seorang perampok, koruptor, pembunuh, atau pemerkosa.

Kelemahan dan bahaya internal demokrasi itu pernah diingatkan Plato, filosof Yunani Kuno. Plato (429-347 BC) menyebut empat kelemahan demokrasi. Salah satunya, pemimpin biasanya dipilih dan diikuti karena faktor-faktor non-esensial, seperti kepintaran pidato, kekayaan, dan latarbelakang keluarga. Plato memimpikan munculnya *"the wisest people"* sebagai pemimpin ideal di suatu negara, *"The wisest people is the best people in the state, who would approach human problems with reason and wisdom derived from knowledge of the world of unchanging and perfect ideas."* Penyair terkenal Muhammad Iqbal juga banyak memberikan kritik terhadap konsep pemerintahan yang menyerahkan keputusannya kepada massa yang berpikiran rendah. Kata Iqbal, bagaimana pun, para semut tidak akan mampu melampaui kepintaran seorang Sulaiman. Ia mengajak meninggalkan metode demokrasi, sebab pemikiran manusia tidak akan keluar dari 200 'keledai'. Ini ditulisnya dalam syairnya, *Payam-e-Masyriq*: *"Do you seek the wealth of meaning from low natured men? From ants cannot proceed the brilliance of a Solomon. Flee from the methods of democracy because human thinking*

¹³Nicholas Lash, *The Beginning and The End of Religion*, (Cambridge:Cambridge University Press, 1996), hal. 252-253.

*can not issue out of the brains of two hundred asses.”*¹⁴

Tapi, benarkah demokrasi adalah pemerintahan yang dipilih mayoritas rakyat? Jika gabungan kata ‘demos’ dan ‘kratos’ diartikan sebagai ‘pemerintahan oleh rakyat’ (*government by the people*), maka biasanya pemerintahan yang demokratis diindikasikan dengan dukungan mayoritas rakyat terhadap. Namun, itulah yang justru terjadi pada kasus pemilihan presiden AS tahun 2000. Pada 5 Desember 2000, Mahkamah Agung AS (*US Supreme Court*), memenangkan George W. Bush atas calon Demokrat, Al-Gore. Kasus ini telah memunculkan perdebatan sengit di AS. Vincent Bugliosi, misalnya, menulis sebuah buku berjudul *The Betrayal of America: How The Supreme Court Undermined The Constitution and Chose Our President*. Bugliosi mengungkap sebuah realitas ironis tentang demokrasi: ‘Pengkhianatan Amerika’. Bagaimana sebuah pemilihan kepala

negara terkuat dan negara demokrasi terbesar di dunia, akhirnya justru diserahkan keputusannya kepada lima orang hakim satu lembaga tinggi negara. Padahal, popular vote, suara rakyat, lebih banyak berpihak kepada Gore. Dengan jumlah pemilih kurang dari 60 persen dari rakyat AS, maka faktanya, Presiden AS juga hanya didukung oleh minoritas rakyatnya. Pemenangan Bush oleh Mahkamah Agung AS itu digambarkan Bugliosi sebagai “*like the day of Kennedy assassination*”.¹⁵

Setelah memangku jabatan Presiden AS, kontroversi demi kontroversi terus merebak ke seluruh penjuru dunia. Pada tataran global, Demokrasi pun lebih digunakan sebagai slogan dan alat kepentingan politik. Tidak ada istilah “demokrasi” ketika Bush memerintahkan tentaranya menduduki Irak, Maret 2003. Puluhan tahun, AS menjadikan Irak sebagai sekutunya. Tapi, ketika kepentingannya tidak terakomodir,

¹⁴Marvin Perry, *Western Civilization: A Brief History*, (Boston: Houghton Mifflin Company, 1997), hal. 63. .” Aristoteles (384-322 BC), murid Plato, juga menyebut demokrasi sebagai bentuk pemerintahan buruk, seperti tirani dan oligarkhi. Tiga bentuk pemerintahan yang baik, menurutnya, adalah monarkhi, aristokrasi, dan polity. Sebelum abad ke-18, demokrasi bukanlah sistem yang dipilih umat manusia. Sistem ini ditolak di era Yunani dan Romawi and hampir semua filosof politik menolaknya. Sejak abad ke-18, beberapa aspek dari demokrasi politik mulai diterapkan di Barat. Beberapa ide ini datang dari John Locke, yang banyak memberi sumbangan pemikiran politik terhadap Inggris dan AS. (Lihat, Sharif, M.M., *History of Muslim Philosophy*, (Karachi: Royal Book Company, 1983), vol I, hal. 98-106; James A. Gould and Willis H. Truit (ed.), *Political Ideologies*, (New York:Macmillan Publishing, 1973), hal. 29; Mazheruddin Siddiqi, *The Image of the West in Iqbal*, (Lahore: Baz-i-Iqbal, 1964), hal. 37.

¹⁵Vincent Bugliosi, *The Betrayal of America: How The Supreme Court Undermined The Constitution and Chose Our President*, (New York: Nation Books, 2001).

maka digunakankah isu “demokrasi” untuk menumbangkan Saddam Hussein.

Di dunia Islam, berbagai kasus semacam ini terlihat begitu mencolok, seperti dalam kasus Pakistan dan Taliban. Jika di masa Perang Dingin dan sampai tahun 1996, Pakistan adalah pendukung kuat Taliban, maka situasi itu berubah total setelah AS menetapkan Taliban sebagai musuhnya. Mengapa Taliban yang dulunya sahabat dan mendapat dukungan AS –juga Pakistan, Arab Saudi– kemudian dihabisi? Tidak terlalu sulit untuk membaca adanya misi kepentingan AS di Afghan. Sebuah pepatah Arab menyatakan: “*Mukhthi’un man zhanna yawman anna li-asysya’labi diinaa.*” (Adalah keliru, orang yang menyatakan, bahwa serigala itu punya agama).

Apakah “darah serigala” itu yang kemudian mengalir di tubuh peradaban Romawi dan pewarisnya? Sejarah perjalanan peradaban Barat sendiri jauh dari nilai-nilai demokrasi dan pluralisme. Sejarah menunjukkan, bagaimana sebuah peradaban yang bernama “Barat” melakukan berbagai tindakan yang sulit dibayangkan oleh akal sehat. Ketika mereka mulai bangkit, mereka melakukan berbagai penindasan dan pemusnahan terhadap berbagai kelompok dan suku umat manusia: suku Indian, suku Inca, Aborigin, dan sebagainya. Mereka juga mengangkut dan memperjualbelikan budak-budak dari Afrika. Dalam lintasan sejarah Afrika, tidak ada yang

lebih kontroversial selain kasus perdagangan budak trans-atlantik dari Afrika ke Barat. J.D. Fage, dalam bukunya, *A History of Africa* (1988), menyebutkan, bahwa dalam tempo 220 tahun (1650-1870), sekitar 10 juta manusia, dieksport sebagai budak dari Afrika ke ‘Dunia Baru’.¹⁶

Bartolome de Las Casas (1474-1567), seorang pastor Dominican, menceritakan perilaku tentara Kristen Spanyol terhadap penduduk asli Amerika. Mereka membantai siapa saja yang ditemui, tanpa peduli wanita, anak-anak atau orang tua. Dan juga dibuat aturan, jika ada seorang Kristen terbunuh, maka sebagai balasannya, 100 orang Indian juga harus dibunuh. (*The Christians, with their horses and swords and lances, began to slaughter and practice strange cruelties among them. They penetrated into the country and spared neither children nor the aged, nor pregnant women, nor those in childbirth, all of whom they ran through the body and lacerated, as though they were assaulting so many lambs herded into the sheepfold... and because sometimes, though rarely, the Indians killed a few Christians for just cause, they made a law among themselves that for one Christian whom the Indians might kill, the Christians should kill a hundred Indians.*)¹⁷

Demokrasi tidak selalu identik dengan kemanusiaan dan kebenaran. Serangan Israel atas Gaza yang dimulai pada penghujung tahun 2008, telah menewaskan ribuan penduduk

¹⁶Philip J. Adler, *World Civilization*, (Belmont: Wasworth, 2000), hal. 397.

Palestina. Sebagian besarnya adalah wanita dan anak-anak. Atas nama demokrasi, serangan itu mendapat dukungan mayoritas rakyat Palestina. Sebagai negara demokrasi terbesar di dunia, AS pun tidak mempedulikan semua kecaman terhadap Israel dan menolak memberikan sanksi apa pun terhadap Israel.

Muslim dan demokrasi

Sebagai satu istilah dan gagasan baru, demokrasi telah menimbulkan beragam respon dari kalangan Muslim. Ada yang menerima demokrasi sebagai pandangan hidup dan keharusan sejarah. Ada yang mengkritisnya. Dan ada juga yang menolaknya mentah-mentah, baik istilah maupun konsepnya. Prof. Masykuri Abdillah, dalam disertasi doktornya di Departemen Sejarah dan Kebudayaan Timur Tengah Universitas Hamburg, yang berjudul “*Responses of Indonesian Muslim Intellectuals to the Concept of Democracy (1966-1993)*”, telah merekam berbagai respon kaum intelektual Muslim terhadap demokrasi.¹⁸

Hingga kini, perdebatan tentang demokrasi masih terus berlangsung. Sebagian kalangan Muslim menolak

keras istilah dan konsep demokrasi. Di Indonesia, pendapat ini di wakili oleh kelompok Hizbut Tahrir dan kelompok Salafi. Tahun 1990, Hizbut Tahrir mengeluarkan kitab karya Abdul Qadim Zallum, berjudul *Ad-Dimuq-rathiyah Nizham Kufr: Yahrumu Akhdzuha aw Tathbiquha aw Ad-Da’watu Ilaiha*. (Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Demokrasi Sistem Kufur: Haram Mengambilnya, Menerapkannya, dan Mempropagandakannya*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 1994).

Buku ini menyimpulkan: Pertama, Demokrasi yang dijajakan Barat adalah sistem kufur; sama sekali tidak ada hubungannya dengan Islam. Kedua, kaum muslimin haram mengambil dan menyebarluaskan demokrasi serta mendirikan partai-partai politik yang berasaskan demokrasi. Kata Abdul Qadim Zallum: “Kaum muslim wajib membuang demokrasi sejauh-jauhnya karena demokrasi adalah najis dan merupakan hukum thaghut.”

Sikap Hizbut Tahrir ini berbeda dengan Ikhwanul Muslimin juga berbagai kelompok Islam lain yang menerima demokrasi dengan kritis. Dalam

¹⁷Philip J. Adler, *World Civilization*, hal 311. Cerita-cerita kekejaman penjajah Kristen Barat terhadap umat manusia, khususnya umat Muslim, tentu terlalu banyak untuk disebutkan. Satu kisah yang jarang terbaca, misalnya, perlakuan Alfonso de Albuquerque terhadap penduduk berketurunan Arab saat menduduki Maluku. Satu laporan menyebutkan, pasukan de Albuquerque selalu memisahkan antara penduduk Arab dengan penduduk asli, setiap menaklukkan suatu kota. Mereka memotong tangan kaum laki-laki dan memotong hidung dan telinga kaum wanita yang berketurunan Arab. (Lihat, Jackson J. Spielvogel, *Western Civilization*, (Belmont: Wadsworth, 2000), hal. 395.

¹⁸Masykuri Abdillah, *Demokrasi Di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999).

pidatonya di Majelis Konstituan, tahun 1955, tokoh Masyumi M. Natsir mengecam keras sistem pemerintahan sekular dan juga pemerintahan teokratis. “Teokrasi adalah satu sistem kenegaraan dimana pemerintahan dikuasai oleh satu priesthood (sistem kependetaan), yang mempunyai hirarki (tingkat ber-tingkat), dan menjalankan demikian itu sebagai wakil Tuhan di dunia. Dalam Islam tidak dikenal *priesthood* semacam itu. Jadi negara yang berdasarkan Islam bukanlah satu teokrasi. Ia negara demokrasi. Ia bukan pula sekuler yang saya uraikan lebih dahulu. Ia adalah negara demokrasi Islam Dan kalaulah saudara Ketua hendak memberi nama yang umum juga, maka barangkali negara yang berdasarkan Islam itu dapat disebut *Theistic Democracy*.”¹⁹

Masyumi juga menegaskan bahwa tujuan partai adalah menegakkan hukum Islam di Indonesia. Di Anggaran Dasar Partai Politik Islam Indonesia Masyumi ditegaskan: “Tujuan Partai ialah terlaksananya ajaran dan hukum Islam, di dalam kehidupan orang seorang, masyarakat dan negara Republik Indonesia, menuju keridhaan Ilahi.” (Pasal III).

Sebuah analisis yang serupa dengan pemikiran Natsir diberikan oleh Prof. TM Hasbi as-Shiddieqy, pakar hukum Islam, dalam bukunya, *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqih Islam*. Buku ini ditulisnya tahun 1969. Menurut

Hasbi, antara Islam dan demokrasi terdapat segi-segi persamaan dan perbedaan. Tapi, tulisnya, “seg-segi perbedaan, lebih banyak daripada segi-segi persamaan.” Ada sejumlah perbedaan yang diungkap Prof. Hasbi:

Pertama, dari segi konsep “rakyat”. Bagi demokrasi modern, rakyat dibatasi oleh batas-batas geografi yang hidup dalam suatu negara, anggota-anggotanya diikat oleh persamaan darah, jenis, bahasa, dan adat-istiadat. Ini berbeda dengan Islam. Umat Islam bukanlah diikat oleh kesatuan tempat, darah, dan bahasa. “Tetapi, yang pokok ialah kesatuan akidah. Segala orang yang menganut akidah Islam, dari jenis mana, warna apa, dan tanah air yang mana, maka dia itu seorang anggota di dalam negara Islam,” tulis Hasbi, dalam buku yang dulu menjadi bahan kuliah di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta.

Kedua, tujuan demokrasi Barat, baik yang modern, ataupun demokrasi kuno, adalah maksud keduniaan, atau tujuan material belaka. Tujuannya hanya mewujudkan kebahagiaan bangsa, yaitu menyuburkan kekayaan atau keagungan duniawi. Ini berbeda dengan tujuan kenegaraan dalam Islam, sebagaimana dirumuskan oleh Ibn Khaldun: “Imamah itu, adalah untuk mewujudkan kemaslahatan akhirat dan kemaslahatan dunia yang kembali kepada kemaslahatan akhirat, karena

¹⁹Mohammad Natsir, *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*, (Media Dakwah, 2001), hal. 220.

segala kemaslahatan dunia dalam pandangan syarak harus diiktibarkan dengan segala kemaslahatan akhirat.”

Ketiga, kekuasaan rakyat dalam demokrasi Barat adalah mutlak. Di Barat, rakyat yang menentukan dan membuat Undang-undang. Tetapi di dalam Islam, kekuasaan rakyat di batasi dengan aturan-aturan Islam yang bersumberkan kepada al-Quran dan Sunnah.

Karena ada perbedaan-perbedaan antara konsep Islam dengan konsep demokrasi Barat, Hasbi mengakui, belum ada istilah khusus untuk menyebut corak pemerintahan Islam. Sebab, konsep Islam itu tidak sama

dengan sistem teokrasi di zaman pertengahan Eropa, yang menjadikan Paus (wakil Tuhan) sebagai pemegang otoritas tunggal keabsahan suatu pemerintahan; tidak sama pula dengan sistem demokrasi Barat yang menjadikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan mutlak, yang menafikan kedaulatan hukum Tuhan. Karena sifatnya inilah, maka sejumlah pakar seperti Habis as-Shiddiqiy menyebutnya sebagai “Demokrasi Islam”?¹⁸

Tentu istilah “Demokrasi Islam” ini masih bisa didiskusikan lebih jauh. *Wallahu A'lam.*

(Depok, 26 Februari 2009).